



Judul : Perkuat ketahanan pangan. Gobel: Optimalkan sektor perikanan
Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Perkuat Ketahanan Pangan Gobel: Optimalkan Sektor Perikanan

PEMERINTAH diminta lebih memperkuat sektor perikanan dan hasil laut agar potensi yang ada bisa digarap secara optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan. Sektor ini mempunyai potensi kontribusi besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi corona (Covid-19).

“Karena itu kita perlu perbaiki *grand design* kebijakan pengembangan sektor perikanan agar dapat berkontribusi signifikan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi corona ini,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, kemarin.

Dijelaskannya, sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai potensi perikanan sampai 67 ton per tahun, baik yang berasal dari ikan tangkap maupun ikan budi daya. Potensi produksi lestari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) mencapai 10 juta ton per tahun, dimana potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton dan perikanan tangkap di perairan darat sekitar 1 juta ton per tahun.

Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*marineculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).

“Dengan potensi tersebut, sektor perikanan harus bisa menjadi salah satu tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui proses peningkatan nilai tambah hasil produksi nelayan maupun lewat penyerapan lapangan kerja,” katanya.

Namun, lanjut Gobel, dari pengamatan dan data yang ada, sektor ini masih menghadapi banyak masalah sehingga po-

tensi ekonominya tidak bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Salah satunya adalah ketidakmampuan melakukan kegiatan perikanan yang lestari.

“Kondisi dan peraturan saat ini belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat azas dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan zonasi tata ruang. Dampaknya, terjadi pencemaran lingkungan di kawasan lindung dan melanggar batasan zona penangkapan ikan,” katanya.

Hal itu terjadi, antara lain karena zonasi pelaku perikanan dan nelayan masih terkonsentrasi di satu titik, khususnya Jawa. Oleh karena itu harus ada kebijakan migrasi bagi pelaku sektor perikanan dari zona jenuh ke wilayah yang lebih luas dan besar potensi tangkapnya.

“Tidak mudah, namun harus dilakukan dengan kebijakan yang taktis dan strategis. Artinya, migrasi dilakukan dengan mengeliminir potensi konflik etnis dan kelompok,” ujar Gobel.

Sebagai gambaran, Gobel mengusulkan, misalnya memindahkan nelayan dan pelaku industri perikanan di Jawa ke daerah tangkap yang luas dengan potensi ikan yang besar di wilayah Sulawesi. Mendorong mereka ke kawasan perairan Majene, Tual, dan Gorontalo, atau ke wilayah Sulawesi lainnya. Butuh kesabaran aparat, SDM pendamping, serta pembangunan industri ikutan dan teknologi di wilayah tersebut.

“Polanya bisa dilakukan dengan langkah pembagian tugas yang tegas, agar nelayan atau pelaku ekonomi maritim tidak kembali lagi ke zona jenuh, karena miskinnya fasilitas pendukung,” katanya. ■ DIT